



---

## Membangun Kepemimpinan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Masyarakat Multikultural

Supriyono<sup>1</sup>, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia.

Muhammad Mona Adha<sup>2</sup>, Jurusan Pendidikan IPS, Universitas Lampung. Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1, Kedaton-Bandar Lampung-Lampung. Indonesia.

e-mail: mohammad.monaadha@fkip.unila.ac.id

---

### Abstrak

Fenomena kepemimpinan nasional dewasa ini telah terjadi degradasi kualitas dan keberpihakan pemimpin. Hal tersebut terlihat dari maraknya tindakan radikal di masyarakat yang dilatarbelakangi karena agama maupun budaya, korupsi yang merajalela, pelanggaran hukum dan hak asasi manusia, kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat, dan beragam problematika lain yang mengemuka. Semuanya terjadi diakibatkan karena krisis kepemimpinan dan tidak adanya teladan dari pemimpin yang menjiwai dan berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Kepemimpinan harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri (*integrity*), sikap bertanggungjawab yang tulus (*compassion*), pengetahuan (*cognizance*), keberanian bertindak sesuai dengan keyakinan (*commitment*), kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain (*confidence*) dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain (*communication*) dalam membangun organisasi. Para pemimpin dapat menggunakan pengaruhnya karena karakteristik pribadinya, reputasinya atau karismanya untuk mempengaruhi perilaku bawahan dalam berbagai situasi. Kepemimpinan berbasis nilai-nilai Pancasila tidak akan dapat terlepas dari bangunan konseptual kelima sila yang ada di dalamnya. Bagaimana sila ketuhanan ditempatkan yang pertama sebagai dasar moralitas. Sebagai sila yang bersifat *causa prima* (sumber dari dari sila-sila yang lain) maka mau tidak mau pemimpin yang dimaksud disini adalah pemimpin yang ber-Tuhan, bermoral dan benar-benar menjalankan eksistensinya di dunia untuk mensejahterakan alam beserta manusia yang beragam di dalamnya.

**Kata Kunci:** Kepemimpinan, Nilai-nilai Pancasila; Masyarakat; Multikultural

*The current phenomenon of national leadership has resulted in a degradation of the quality and alignments of leaders. This can be seen from the rampant radical actions in society that are motivated by religion and culture, rampant corruption, violations of law and human rights, economic policies that do not side with the people, and various other problems that arise. Everything happened due to the leadership crisis and the absence of role models from leaders who live and are based on the values of Pancasila. Leadership must have honesty with oneself (integrity), sincere responsibility (compassion), knowledge (cognizance), courage to act by beliefs (commitment), trust in yourself and others (confidence), and the ability to convince others (communication) in building an organization. Leaders can use their influence because of their personal characteristics, reputation, or charisma to influence the behavior of subordinates in a variety of situations. Leadership based on Pancasila values cannot be separated from the conceptual building of the five precepts in it. How are the divine precepts placed first as the basis of morality? As a principle that is *causa prima* (the source of other precepts), inevitably the leader referred to here is a leader who*

*is godly, moral and truly carries out his existence in the world for the welfare of nature and the various humans in it.*

**Keywords: Leadership; Multicultural; Pancasila Values; Society**

---

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki warisan dan tantangan pluralisme budaya (*cultural pluralism*) secara lebih mencolok, sehingga dipandang sebagai lokus klasik bagi bentukan baru masyarakat majemuk (*plural society*) atau yang disebut masyarakat pluralistik (Adha, 2015). Kemajemukan masyarakat Indonesia paling tidak dapat dilihat dari dua cirinya yang unik. *Pertama*; secara horisontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat serta perbedaan kedaerahan. *Kedua*, secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam (Nasikun, 2007:3).

Menjadi berkah jika keragaman yang ada bergerak menuju Indonesia yang satu tanpa menghilangkan karakter dan identitas masing-masing. Namun, manakala keragaman itu bergerak tanpa arah dalam pengertian tidak maju Indonesia yang satu karena lebih menonjolkan identitas masing-masing (*communitarian culture*) dari keragaman itu niscaya akan mendatangkan konflik sosial yang besar. Konflik-konflik sosial yang telah terjadi di Indonesia pada tahun-tahun terakhir ini telah menyentuh perasaan manusia dan membangkitkan kecemasan dan ketakutan, karena konflik-konflik tersebut cenderung bersifat destruktif dan menyebabkan kesengsaraan bagi banyak orang. Hal ini karena konflik sosial yang terjadi di beberapa daerah tidak dapat dipecahkan oleh mekanisme yang ada, seperti melalui musyawarah.

Konflik berbau sara yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan yang terjadi di Aceh, Ambon, Papua, Kupang, Maluku dan berbagai daerah lainnya adalah realitas

yang dapat mengancam integrasi bangsa di satu sisi dan membutuhkan solusi konkret dalam penyelesaiannya. Belum lagi masalah-masalah lain seperti korupsi, narkoba, pergaulan bebas yang semua itu tentunya merusak moral bangsa. Persoalan ini kemudian menyebabkan dampak negatif yang banyak, baik material maupun immaterial, baik fisik maupun psikologis bagi banyak orang. Mendasari hal tersebut sangat penting diimplementasikan berbagai program yang mempertemukan warga negara, terutama warga negara muda khususnya melalui kegiatan kemasyarakatan yang bersifat institusional atau *volunteerism* (Adha, 2019; Adha et al., 2019a) agar kelak para calon pemimpin memahami karakteristik pluralistik yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, bangsa Indonesia memerlukan seorang pemimpin yang dapat mewujudkan pembangunan nasional sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan yang melanda warganegara sebagai masyarakat multikultural. Dalam rangka menjalankan tugas kewajibannya seorang pemimpin harus dapat menjaga kewibawaannya.

Berhasilnya pembangunan nasional tergantung peran aktif rakyat Indonesia, dengan sikap mental, tekad semangat, ketaatan dan disiplin nasional dalam menjalankan tugas kewajibannya. Oleh karena itu, perlu dikembangkan motivasi membangun di kalangan masyarakat luas dan motivasi pengorbanan pengabdian pada unsur kepemimpinannya. Norma-norma yang tercakup dalam Pancasila itu sekaligus merupakan sistem nilai yang harus dihayati dan diamalkan oleh setiap warga negara, khususnya para pemimpin. Melalui pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinan, maka nilai-nilai

Pancasila dijadikan sebagai landasan dan pegangan dalam kepemimpinannya untuk mewujudkan tujuan nasional.

## **KONSEP KEPEMIMPINAN NASIONAL**

Beberapa pendapat para ahli tentang kepemimpinan mengandung pengertian dan makna yang sama. Antara lain dikemukakan oleh:

### 1. Sutarto

Kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### 2. Sondang P. Siagian

Kepemimpinan adalah suatu kegiatan mempengaruhi orang lain agar melaksanakan pekerjaan bersama menuju suatu tujuan tertentu.

### 3. Ordway Tead

Kepemimpinan adalah aktifitas mempengaruhi orang-orang agar mau bekerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

### 4. George Terry

Kepemimpinan adalah hubungan yang erat ada dalam diri orang atau pemimpin, mempengaruhi orang-orang lain untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai keinginan pemimpin.

### 5. Franklin G. Moore

Kepemimpinan adalah kemampuan membuat orang-orang bertindak sesuai dengan keinginan pemimpin. Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa kepemimpinan pada dasarnya merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggerakkan orang lain agar mau bekerja dengan senang hati untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Agar mampu melaksanakan tugas kewajibannya, pemimpin harus dapat menjaga kewibawaannya. Dia harus memiliki kelebihan-kelebihan tertentu bila dibanding dengan kualitas orang-orang

yang dipimpinya. Kelebihan ini terutama meliputi segi teknis, moral, dan semangat juangnya (Irma Yulianti, 2011). Beberapa kelebihan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. sehat jasmaninya, dengan energi yang berlimpah-limpah, dan keuletan tinggi.
2. memiliki integritas kepribadian, sehingga dia matang, dewasa, bertanggung jawab, dan susila.
3. rela bekerja atas dasar pengabdian dan prinsip kebaikan, serta loyal terhadap kelompoknya.
4. memiliki inteligensi tinggi untuk menanggapi situasi dan kondisi dengan cermat, efisien-efektif, memiliki kemampuan persuasi, dan mampu memberikan motivasi yang baik kepada bawahan.
5. mampu menilai dan membedakan aspek yang positif dari yang negative dari setiap pribadi dan situasi, agar mendapatkan cara yang paling efisien untuk bertindak.

Kartono (2008) menjelaskan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh kepemimpinan, yaitu:

1. Kepemimpinan di era pembangunan nasional harus bersumber pada falsafah negara, yakni pancasila
2. Kepemimpinan Pancasila mampu menggali intisari dari nilai-nilai tradisional yang luhur, untuk kemudian dipadukan dengan nilai-nilai positif dari modernisasi.
3. Memahami benar makna dari perencanaan, pelaksanaan, dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai

Menurut (Hakim, 2013) Kepemimpinan berbasis Pancasila tidak akan dapat terlepas dari bangunan konseptual kelima sila yang ada di dalamnya. Bagaimana sila ketuhanan ditempatkan yang pertama sebagai dasar moralitas. Sebagai sila yang bersifat kausa prima (sumber dari dari sila-sila yang lain)

maka mau tidak mau pemimpin yang dimaksud disini adalah pemimpin yang ber-Tuhan, bermoral dan benar-benar menjalankan eksistensinya di dunia untuk mensejahterakan alam beserta manusia yang ada di dalamnya.

Sila kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan bernegara dan berbangsa. Sifat humanisme universal yang diperjuangkan seluruh bangsa-bangsa melalui HAM (Hak Asasi Manusia). Sila ketiga adalah sila persatuan, yang juga sebagai cara untuk mencapai tujuan bernegara dan berbangsa. Dalam pembahasan kepemimpinan antara *goal oriented* dan *process oriented*, maka Kepemimpinan berbasis Pancasila menekankan pada semangat persatuan yang artinya semangat untuk terus berproses.

Sila keempat, adalah tentang kerakyatan atau demokrasi Indonesia, yang menjadi tujuan mengapa kita bernegara dan berbangsa. Kepemimpinan berdasarkan nilai dasar sila ini adalah yang mampu membangun sistem yang demokratis dalam bernegara dan berbangsa, baik dalam aspek politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya sehingga tercapai tujuan nasional secara demokratis dan bermartabat.

Sila kelima adalah tentang keadilan social yang menjadi tujuan akhir kita bernegara. Intinya, yang dibangun Kepemimpinan berbasis Pancasila bukan hanya melulu tentang keadilan hukum, bukan hanya keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan dalam pendidikan, namun yang mempunyai tantangan tinggi yakni keadilan sosial.

## **HAKIKAT SILA PANCASILA**

Tentang hakikat sila-sila Pancasila perlu ditengarai makna dan arti dari setiap sila Pancasila secara hakiki agar mendapatkan gambaran tentang inti arti Pancasila agar dapat menjelma dan menjadi kepribadian bangsa atau masyarakat Indonesia (Adha & Susanto, 2020). Maka,

sudah tepat hanya lima sila itu yang dimasukan dalam dasar filsafat negara sebagai inti kesamaan dari segala keadaan yang beraneka warna dan juga telah mencukupi, dalam arti tidak ada lainnya yang tidak dapat dikembalikan kepada salah satu sila Pancasila. Notonegoro (Pandji Setijo, 2010:18).

Sila Pertama; Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan YME, pencipta alam semesta beserta isinya. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ditegaskan meskipun bukan negara agama, bukan juga negara sekuler melainkan adalah negara beragama. Bukan negara agama karena tidak menerapkan hukum agama tertentu sebagai hukum positif. Bukan pula negara sekuler yang memisahkan urusan negara dan urusan agama, sedangkan negara beragama dimaksud bahwa NKRI perlu hukum positif yang disepakati oleh seluruh bangsa, termasuk seluruh penyelenggara negara yang agamanya beraneka ragam dan negara wajib melindungi segenap agama yang diakui serta negara tidak dibenarkan mencampuri urusan akidah agama apapun.

Sila Kedua; Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia yaitu manusia berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan cipta karena berpotensi menduduki martabat yang tinggi. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif apalagi sewenang-wenang dan otoriter. Beradab berasal dari kata adab, memiliki arti budaya yang telah berabad-abad dalam kehidupan manusia. Jadi beradab berarti berkebudayaan yang lama berabad-abad, bertata kesopanan, dan bermoral.

Sila Ketiga; Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu berarti utuh tidak terpecah-belah, mengandung bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam yang bersifat kedaerahan menjadi satu kebulatan secara nasional. Selain itu, persatuan bangsa yang bersifat nasional

mendiami suatu wilayah Indonesia, bersatu menuju kehidupan bangsa yang berbudaya bebas dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat menuju terbentuknya suatu masyarakat madani.

Sila Keempat; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung arti bahwa rakyat dalam NKRI menjalankan keputusannya dengan jalan musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat serta penuh tanggungjawab dari para pemimpin yang profesional, baik kepada Tuhan YME maupun kepada rakyat yang diwakilinya.

Sila Kelima; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat segenap bidang kehidupan. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Jadi, setiap bangsa Indonesia mendapat perlakuan yang adil dibidang hukum, politik, social, ekonomi dan budaya.

Pancasila secara bulat dan utuh sangat sesuai menjadi milik bangsa Indonesia sebagai dasar dan ideologi negara. Setiap warganegara Indonesia wajib memahami makna dari sila-sila pancasila dan menjadikan nilai-nilai pancasila sebagai landasan bersikap dan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Faradila et al., 2014).

Secara ringkas (Latif, 2011) menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasila sebagai berikut: Pertama; menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai ketuhanan (religiusitas) sebagai sumber etika dan spiritualitas dianggap penting sebagai fundamentaletika kehidupan bangsa. Kedua; menurut alam pemikiran Pancasila, nilai nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia (yang bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamental etika

politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Landasan etika sebagai prasarat persaudaraan universal ini adalah adil dan beradab.

Ketiga; menurut alam pemikiran Pancasila, aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan itu terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. menurut alam pemikiran Pancasila, Persatuan dari kebhinnekaan masyarakat Indonesia dikelola berdasarkan konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan yang dalam slogan negara dinyatakan dalam ungkapan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat; menurut alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kelima; menurut alam pemikiran Pancasila, dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila yang dikehendaki adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai mahluk individu, mahluk sosial, juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial dan budaya.

## **KONSEPSI MASYARAKAT MULTIKULTURAL**

Pada dasarnya suatu masyarakat dikatakan multikultural jika dalam masyarakat tersebut memiliki keanekaragaman dan perbedaan (Taufani et al., 2013). Keragaman dan perbedaan yang dimaksud antara lain, keragaman struktur budaya yang berakar pada perbedaan standar nilai yang berbeda-beda, keragaman ras, suku, dan agama, keragaman ciri-ciri fisik seperti warna kulit, rambut, raut muka, postur tubuh, dan lain-lain, serta keragaman kelompok sosial dalam masyarakat.

Sikap yang harus dilakukan dalam masyarakat kultural dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Pengakuan terhadap berbagai perbedaan dan kompleksitas kehidupan dalam masyarakat.
- b. Perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas dan budaya, baik yang mayoritas maupun minoritas.
- c. Kesederajatan kedudukan dalam berbagai keanekaragaman dan perbedaan, baik secara individu ataupun kelompok serta budaya.
- d. Penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak asasi manusia dan saling menghormati dalam perbedaan.
- e. Unsur kebersamaan, kerja sama, dan hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan.

Sikap yang harus dihindari untuk membangun masyarakat multikultural yang rukun dan bersatu, ada beberapa nilai yang harus dihindari, yaitu:

- a. Primordialisme  
Primordialisme artinya perasaan kesukuan yang berlebihan. Menganggap suku bangsanya sendiri yang paling unggul, maju, dan baik. Sikap ini tidak baik untuk dikembangkan di masyarakat yang multicultural seperti Indonesia. Apabila sikap ini ada dalam diri warga suatu bangsa, maka kecil kemungkinan mereka untuk bisa menerima keberadaan suku bangsa yang lain.
- b. Etnosentrisme  
Etnosentrisme artinya sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan yang lain. Indonesia bisa maju dengan bekal kebersamaan, sebab tanpa itu yang muncul adalah disintegrasi sosial. Apabila sikap

dan pandangan ini dibiarkan maka akan memunculkan provinsialisme yaitu paham atau gerakan yang bersifat kedaerahan dan eksklusivisme yaitu paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat.

- c. Diskriminatif  
Diskriminatif adalah sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku bangsa, ekonomi, agama, dan lain-lain. Sikap ini sangat berbahaya untuk dikembangkan karena bisa memicu munculnya antipati terhadap sesama warga negara.
- d. Stereotip  
Stereotip adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Indonesia memang memiliki keragaman suku bangsa dan masing-masing suku bangsa memiliki ciri khas. Tidak tepat apabila perbedaan itu kita besar-besarkan hingga membentuk sebuah kebencian

Multikultur sebagai praktik sosial dan kebijakan pemerintah, dewasa ini telah diterima di banyak negara sebagai sesuatu yang penting. Multikulturalisme bahkan menjadi semacam ideologi dalam mengembangkan kebudayaan serta upaya menciptakan masyarakat yang sehat. Multikulturalisme pada hakikatnya dimaksudkan untuk menciptakan suatu konteks sosiopolitis yang memungkinkan individu dapat mengembangkan kesehatan jati diri dan secara timbal balik mengembangkan sikap-sikap antar kelompok yang positif demi tegaknya demokrasi, HAM dan kesejahteraan rakyat (Suparlan, 2002: 99). Proses untuk menapaki jalan menuju pengakuan tersebut adalah sebuah pendakian yang terjal dan sikap terhadap realitas multikultural masyarakat/bangsa mengalami fluktuasi perkembangan sepanjang sejarah.

Multikulturalisme pada masa lampau dipandang sebagai suatu yang tidak berguna dan pandangan yang anti pluralisme ini justru berkembang di negara-negara Barat. Multikulturalisme hanya menciptakan garis pemisah yang kuat antara kelompok dalam masyarakat, karena itu apa yang seharusnya terjadi adalah asimilasi. Jika ditinjau dari aspek hak-hak asasi manusia maka multikulturalisme disamping melindungi hak-hak individu, menyangkut hak-hak kolektif ataupun budaya komunitas (Kymlicakia, 2011: 50-51). Jadi, tidak beralasan jika kaum liberal merasa ketakutan bahwa hak kolektif yang dituntut oleh kelompok etnis tertentu dianggap berlawanan dengan hak perorangan. Kedua jenis tuntutan dan hak asasi itu dipandang sebagai upaya perlindungan stabilitas komunitas bangsa. Multikulturalisme mencakup apa yang disebut demokrasi sosial yaitu suatu jenis liberalisme tersendiri yang menjebatani jurang antara hak-hak individu dengan komunitas. Demokrasi sosial secara politis berkomitmen memberikan dan melindungi seluruh hak asasi manusia. Pandangan demikian ini agak berbeda dengan definisi yang sering dijadikan standar tentang demokrasi sosial sebagai suatu etos dan cara hidup yang dicirikan oleh penghapusan perbedaan-perbedaan status secara umum. Dalam demokrasi sosial tidak mensyaratkan adanya penghapusan perbedaan ekonomi secara radikal. Sebab penghapusan itu menghalangi inisiatif yang diperlukan untuk memajukan ekonomi pada tingkat kolektif dan individu, bahkan dapat mengekibatkan standar kehidupan masyarakat merosot secara umum.

Keanekaragaman etnik-budaya Indonesia hendaknya bukan faktor penentu pemecah belah bangsa, melainkan diharapkan mampu menjadi bumbu kehidupan perekat bangsa khususnya Indonesia (Kymlicka, 2011; Adha, 2015; Adha et al., 2019). Tradisi dalam pemikiran kita yang kuat walaupun sering menyesatkan adalah bahwa manusia hanya merasakan perasaan sebagai komunitas

ketika mereka menganggap diri mereka sama dengan anggota-anggota lainnya dalam suatu masyarakat (Blum, 2001:25). Perlunya penghargaan keanekaragaman etnis dan budaya dalam masyarakat majemuk ini juga dikemukakan oleh sejarawan Amerika Serikat Michael Kammen dalam karyanya "*People of Paradox*". Masyarakat multikultur atau multibudaya berarti mereka yang telah mempelajari dan menggunakan kebudayaan secara cepat, efektif, jelas, serta ideal dalam interaksi dan komunikasi dengan orang lain (Kymlicka, 2011; Liliweri, 2003:16). Definisi ini jelas merujuk pada masyarakat yang memiliki budaya sekaligus melaksanakan budaya yang dijunjung tinggi dalam masyarakat yang bersangkutan. Melaksanakan ritual budaya yang dijunjung tinggi tersebut digunakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan budaya lain. Interaksi dan komunikasi tersebut dalam rangka saling menghargai/ menghormati sekaligus memperkaya budaya masing-masing.

Masyarakat multikultur merupakan masyarakat yang mampu memerankan dirinya sebagai arbiter, penengah bagi proses rekonsiliasi ketika proses dialetika tersebut menemukan titik jenuh. Untuk keperluan ini masyarakat dituntut untuk meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual agar memiliki sensitifitas, sensibilitas, apresiasi, simpati dan empati terhadap outsider. Sebagaimana yang disampaikan (Tilaar, 2004: 37) bahwa masyarakat multikultur menyimpan banyak kekuatan dari masing-masing kelompok, sekaligus menjadi benih perpecahan. Multikulturalisme sebenarnya merupakan konsep dimana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan dan kemajuan budaya baik ras, suku (etnis) dan agama. Bangsa yang multikultur adalah bangsa kelompok-kelompok etnik atau budaya (*ethnic and cultural groups*) yang ada dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip *co existence* yang ditandai oleh

kesediaan untuk menghormati budaya lain untuk memperkuat sikap nasionalisme (Sari et al., 2013).

Interaksi sosial dalam multikultur memerlukan pengenalan dan pemahaman atas karakteristik sosial yang menjadi ciri khas komunitasnya. Oleh karena itu untuk mengenal isme-isme yang dibangun dari variasi kultur pada karakteristik sosialnya. Menurut Parekh untuk mengenal karakteristik sosial dalam multikultur perlu dibedakan dengan jelas. Multikulturalisme dibedakan menjadi lima pembagian antara lain *isolasionis*, *akomodatif*, *otonomis*, *kritikal* dan *kosmopolitan*.

#### 1) Multikulturalisme *isolasionis*

Multikulturalisme *isolasionis* mengacu pada masyarakat dimana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi terbatas satu sama lain. Perbedaan kultur yang dimiliki masing-masing masyarakat berjalan secara independen. Fungsi komunitas sosial antar kultur masyarakat berjalan secara alami. Proses asosiatif dan disosiatifnya berjalan beriringan. Meskipun demikian, latar belakang kultur yang berbeda menjadikan masyarakat membatasi diri untuk berkomunikasi secara bebas. Disamping itu, kebebasan yang dibangun tetap tidak mengganggu komunikasi sosial yang selayaknya terjadi dalam masyarakat.

#### 2) Multikulturalisme *akomodatif*

Multikulturalisme *akomodatif* menggambarkan masyarakat plural yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Aliran ini mengarah pada pembagian mayoritas dan minoritas, superior dan inferior secara ketat aliran masyarakat yang memiliki kultur mayoritas memberikan peluang berkembangnya kebutuhan kultur bagi masyarakat minoritas. Pada potret multikulturalisme akomodatif menyatakan dengan jelas pekerjaannya fungsi-fungsi sosial untuk mengembangkan kebutuhan kultur bagi komunitas lainnya. Dari proses asosiasi ini

dapat digambarkan proses interaksi sosial pada multikulturalisme akomodatif ini cukup positif. Namun demikian, pada multikulturalisme akomodatif ini cukup positif. Namun demikian, terdapat celah berjalannya disosiatif berupa kontraversi dan persaingan kultur pada masyarakat.

#### 3) Multikulturalisme *otonomis*

Multikulturalisme *otonomis* menggambarkan kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom. Kelompok-kelompok kultural ini dalam rangka mempertahankan cara hidup mereka yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan. Kelompok ini menentang kelompok lain, tetapi antar kelompok dapat menerima perbedaan kelompok lain dan dapat eksis sebagai mitra sejajar (Liliweri, 2003:16-18). Isme yang dibangun mengusahakan agar dapat setara dengan komunitas lain yang memiliki dominasi kultural. Teknik yang dikembangkan berusaha untuk mengembangkan sayap isme yang ada agar dapat diterima pada komunitas yang lebih besar, meskipun sebenarnya mereka menentang kultur pada kelompok lain. Dengan demikian, dalam kurun waktu tertentu komunitas minor dapat diterima sejajar dengan komunitas dominan.

#### 4) Multikulturalisme *kritikal*

Multikulturalisme *kritikal* atau interaktif menggambarkan kelompok-kelompok kultur yang tidak terlalu *concern* dengan kehidupan otonom. Multikulturalisme *kritikal* lebih menuntut penciptaan kultur relatif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif *distingtif* mereka. Pada kultur ini dibangun penciptaan kultur kolektif, keberbedaan antar kultur bukan menjadi hal yang diperdebatkan, tetapi justru dengan koleksitas kultur yang berbeda tersebut dibentuk untuk menunjukkan keberbedaan nyata antar kultur. Dapat dipastikan, sekecil apapun dalam penciptaan kultur kolektif masyarakat akan menjadi kompetisi antar



kultur, meskipun diyakini keberbedaan bukan merupakan sesuatu yang utama.

#### 5) Multikulturalisme *kosmopolitan*

Multikulturalisme *kosmopolitan* berusaha menghapuskan batas-batas kultur untuk menciptakan sebuah masyarakat (setiap individu) yang tidak terikat dan committed kepada budaya tertentu. Multikulturalisme kosmopolitan ini secara bebas terlibat dalam eksperimen-eksperimen intercultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultur masing-masing. Memahami agama dan budaya orang lain untuk kemudian kembali pada masing-masing identitasnya, sehingga tidak ada lagi identitas yang bersifat parsial melainkan identitas bangsa yang berwawasan multi budaya. Menyelam untuk timbul agar tidak terpenjara oleh fanatisme apalagi *cauvinisme*. Para pendukung multikulturalisme jenis ini sebagian besar adalah intelektual diasporik dan kelompok liberal yang memiliki kecenderungan postmodernist memberikan pandangan bahwa seluruh budaya sebagai reources yang dapat mereka ambil secara bebas.

### SIMPULAN

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, yang memiliki corak kebhinekaan, baik etnis, suku, budaya, maupun keragaman dalam politik dan ekonomi. Karena hal itu, kerap menimbulkan pola pikir yang mementingkan kelompok atau primordialisme. Kondisi yang demikian menyebabkan masyarakat Indonesia secara umum, masih sulit mengadakan penyesuaian terhadap hadirnya nilai-nilai baru. Oleh karena itu, diperlukan sosok kepemimpinan yang dapat mengintegrasikan keragaman tersebut dan dapat memadukan atau menggali inspirasi dari nilai-nilai luhur nusantara dan nilai-nilai kamajuan universal yaitu Pancasila. Kepemimpinan yang berbasis nilai-nilai Pancasila mengisyaratkan kepemimpinan itu harus didasarkan pada nilai-nilai

pancasila seperti yang dijelaskan oleh lima sila yang ada pada ideologi negara ini. Kepemimpinan yang Thesis (percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa), kepemimpinan yang humanis (memiliki rasa kemanusiaan), kepemimpinan yang demokratis, kepemimpinan yang runitaris (mempersatukan) dan kepemimpinan yang sosial *justice* (kepemimpinan yang berkeadilan).

### DAFTAR PUSTAKA

- Adha, M.M. (2015). Pendidikan Kewarganegaraan Mengoptimalisasikan Pemahaman Perbedaan Budaya Warga Masyarakat Indonesia Dalam Kajian Manifestasi Pluralisme Di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 14(2), 1-10.
- Adha, M.M. (2019). Advantegous of Volunteerism Values for Indonesian Community and Neighbourhoods. *International Journal of Community Service Learning*, 3(2), 83-100.
- Adha, M.M., Ulpa, E.P., Johnstone, J.M., & Cook, B.L. (2019a). Pendidikan Moral pada Aktivitas Kesukarelaan Warga Negara Muda. *Journal of Moral and Civic Education*, 3(1), 28-37.
- Adha, M. M., Budimansyah, D., Sapriya., & Sundawa, D. (2019b). Emerging Volunteerism for Indonesia Millennial Generation: Volunteer Participation and Responsibility. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 29 (4), 467-483.
- Adha, M.M., & Susanto, E. (2020). Kekuatan Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, 15(01), 121-138.
- Blum, L.A. (2001) *Antirasisme, Multikultural dan Komunitas Antar Ras; Tiga Nilai yang Bersifat Mendidik Bagi Sebuah Masyarakat*

- Multikultural*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Faradila, A.H., Holilulloh., & Adha, M.M. (2014). Pengaruh Pemahaman Ideologi Pancasila Terhadap Sikap Moral dalam Mengamalkan Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 3(7).
- Hakim, A.L. (2013). Kepemimpinan Berbasis Pancasila: Sarana untuk Mencapai Kemajuan dan Kesejahteraan. Blognya Alif Kecil [online] <https://aliflukmanulhakim.wordpress.com/2013/08/26/kepemimpinan-berbasis-pancasila-sarana-untuk-mencapai-kemajuan-dan-kesejahteraan>.
- Kartono, K. (2008). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kymlicka, W. (2011). *Kewargaan Multikultural*. Terjemahan Edlina Hafmini Eddin. Jakarta: LP3ES.
- Latif, Y. (2011). *Pancasila dasar dan Haluan Negara, Makalah dalam Lokakarya Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: MPR RI, 17-19 Juni 2011.
- Liliweri, A. (2003) *Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: LKIS.
- Nasikun. (2007). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suparlan, P. (2002). *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*. *Jurnal*
- Setijo, P. (2010). Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Taufani, P., Holilulloh., & Adha, M.M. (2013). Sikap Masyarakat Multikultur Terhadap Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 1(7).
- Sari, V.Y., Holilulloh., & Adha, M.M. (2013). Pengaruh Pemahaman Sejarah Perjuangan Bangsa terhadap Sikap Nasionalisme pada Materi PKn. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 1(9).
- Tillaar, H.A.R. (2004) *Multikultural; Tantangan-tantangan GlobalMasa Drepan Dalam Reformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Yulianti, I. (2011). Kepemimpinan Pancasila. Curiosita' Blog [online] <http://irma-yulianti.blogspot.com/2011/06/kepemimpinan-pancasila.html>